

## **BAB III**

### **LATAR BELAKANG BAMBANG SUGENG MENJADI SEORANG**

#### **DIPLOMAT**

##### **3.1 Keluar Sebagai Anggota Angkatan Darat**

Sosok pribadi Jenderal Mayor Bambang Sugeng pada masa hidupnya dikenal sebagai seseorang yang berpenampilan sederhana. Sederhana dalam dalam berbicara nmaupun dalam berpakaian dan dalam segala hal. Kesederhanaan tersebut diwarisi dan berkat didikan orang tuanya yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara di samping keberanian dan kejujurannya.<sup>53</sup> Bambang Sugeng merupakan manusia yang menginginkan harmoni kehidupan, sifat dan budi pekertinya selalu berusaha mencari titik temu, ditengah pandangan yang berbeda bahkan bertentangan. Karena sifat dan budi pekertinya pada saat Bambang Sugeng menjabat kepala Staf Angkatan Darat ia memainkan peran dalam permasalahan-permasalahan TNI AD yang bercampur dengan permasalahan politik.<sup>54</sup>

Bambang Sugeng bukanlah seorang politikus, namun ia sangat berpengalaman dalam bidang politik. Pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum 1971, ia berpendapat tentang politik secara singkat ia hanya

---

<sup>53</sup> Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, *Op.cit* ., Hlm 167.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 167.

menyatakan “ Saya sudah kenyang politik”. Dan ketika ditanya siapa yang akan dipilihnya dalam pemilu tersebut, ia hanya mengatakan bahwa pemilihan umum tersebut tidak umum, dalam arti yang luas “ tidak sebebas yang dulu”. Memang selagi menjabat kepala Staf Angkatan Darat, Bambang Sugeng adalah orang yang tidak bisa dijadikan sebagai umpan politik komentar daripada *Harian Indonesia Raya* tahun 1953.<sup>55</sup>

Bambang Sugeng sebagai perwira senior dan karena pembawaan sifat-sifatnya diangkat sebagai KSAD Setelah Kolonel A.H. Nasution menyatakan mundur sebagai KSAD akibat peristiwa 17 Oktober 1952. Pada saat itu Bambang Sugeng sangat berusaha untuk mempersatukan kembali kerukunan di dalam tubuh Angkatan Darat.<sup>56</sup>

Kejujuran dan tekadnya yang kuat Bambang Sugeng berhasil menyembuhkan luka-luka dalam tubuh angkatan Darat. Hanya sebentar reda pertentangan di dalam tubuh Angkatan Darat muncul kembali intrik, hasutan dan fitnah untuk memecah belah kembali Angkatan Darat. Pada saat itu Bambang Sugeng masih berusaha untuk menghadapi godaan perpecahan dari dalam dan tekanan-tekanan dari luar.pada saat itu Bambang Sugeng sudah tidak bisa lagi menghadapi cobaan tersebut. Mental Bambang Sugeng sudah tidak bisa lagi menghadapi tekanan dalam Angkatan Darat yang dipimpinnya, sehingga sebagai seseorang yang sudah patah hati dan kehilangan gairah dan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 168.

<sup>56</sup> Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, *loc.cit*.

semangat, ia keluar sebagai anggota Angkatan Darat. Sebagai Prajurit Sapta Marga ia mencoba untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan fisiknya, mental dan spritiual, namun tugas yang dipangkunya selama ini terlalu berat bagi Bambang Sugeng.<sup>57</sup>

Bambang Sugeng diberhentikan dengan hormat atas permohonannya sendiri dari jabatan KSAD, sesuai dengan surat keputusan Presiden RI Nomor: 117/M/tahun 1955 tanggal 13 Mei 1955, yang terhitung dari tanggal 8 Mei 1955. Pada saat itu Bambang Sugeng meminta berhenti sebagai KSAD pada tahun 1955 dengan mengajukan permohonan sebanyak lima kali kepada presiden Soekarno karena pada saat itu ada perebedaan yang tidak bisa lagi diselesaikan. Bagi Bambang Sugeng pertimbangan politik berbeda dengan pertimbangan ketentaraan.

Bambang Sugeng prinsipnya pada saat itu tidak sejalan dengan Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri mengenai penyelesaian Akibat Peristiwa 17 Oktber 1952. Sebab dalam pandangannya Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan hasil dari “petulangan politik”, karena DPR terlalu jauh ikut campur dalam urusan intern TNI AD. Sedangkan menurut Iwa Kusuma Sumantri, selaku menteri Pertahanan Negara RI merasa berkepentingan

---

<sup>57</sup> Edi Hartoto, *op.cit*, hlm 140.

langsung untuk menempatkan orang-orang yang sepihak dengannya di dalam struktur organisasi TNI AD.<sup>58</sup>

Peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan peristiwa bersejarah bagi angkatan Perang Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat di mana telah terjadi suatu demonstrasi massa di Jakarta, disertai dengan demonstrasi senjata berat yang diarahkan ke Gedung Parlemen dan Istana Merdeka yang di organisir oleh sekelompok rakyat. Para demonstran dengan slogan-slogan dan poster menuntut bubarkan parlemen sekarang juga, parlemen tidak ada gunanya parlemen tidak representative, parlemen bukan warung kopi, suara rakyat suara merdeka, rakyat tidak bisa membiayai siding dan slogan—slogan lainnya yang menggambarkan rasa kekeewaan serta rasa ketidakpuasaan rakyat kepada cara kerja parlemen saat itu.<sup>59</sup>

Pada saat yang bersamaan rombongan Angkatan darat pimpinan KSAD Kolonel A.H. Nasution bersama dengan para panglima Daerah menghadap presiden Soekarno ke istana untuk menyampaikan saran dan pendapat tentang situasi pemerintahan terutama dalam hal ampur tangan DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) mengenai masalah-masalah Angkatan Darat, sehingga dalam kesempatan itu kolonel A.H Nasution mengusulkan agar presiden membubarkan DPRS dan mengambil alih kekuasaan Negara demi keselamatan negara.

---

<sup>58</sup> Edi Hartoto, *loc.cit.*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 108.

Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Angkatan darat untuk menyudutkan kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H Nasution pada saat itu. Suasana merunging dengan adanya pernyataan dari BISAP (Badan Informasi Staf Angkatan Perang) yang menyatakan bahwa demonstrasi 17 Oktober 1952 disetujui dan dibantu, atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Angkatan Perang. Tanggapan dan sanggahan yang dijelaskan oleh A.H nasution pada saat itu mengani peristiwa 17 Oktober 1952 tidak membuahkan hasil dan tidak menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan gangguan dan solidaritas Angkatan Darat sehingga terjadi penggantian panglima-panglima daerah diluar prosedur yang berlaku.

Berlarutnya persoalan-persoalan Angkatan Perang yang semakin genar dibicarakan di DPRS tetapi belum juga mendapatkan penyelesaian, makasa KSAD kolonel A.H Nasution melalui sebuah nota kepada menteri pertahanan meminta agar pemerintah membebaskan dirinya dari KSAD dan sekaligus sebagai pertanggung jawaban dalam peristiwa 17 Pktober 1952. Dengan pertimbangan yang cukup akhirnya presiden menerima pengunduran diri pak Nasution dan mengangkat kolonel Bambang Sugeng sebagai kasad. Beban tugas kolonel Bambang Sugeng sebagai kasad sangatlah berat terutama menyatukan pro dan kontra di tubuh organisasi Angkat Darat. Dalam mengatasi masalah ini timbul pemikiran lahirnya piagam keutuhan Angkatan

Darat yang dianggap dapat mewartakan kembalinya solidaritas Angkatan Darat. Masalah Internal Angkatan Darat yang mewarnai munculnya peristiwa 17 Oktober 1952, berawal dari ketidakpuasaan terhadap kebijakan dan kepemimpinan pimpinan Angkatan Darat dalam membangun Angkatan Darat.

60

Menteri Iwa Kusuma Sumantri untuk mengisi lowongan jabatan KSAD ia mengusulkan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai pengganti Bambang Sugeng, dengan 3 pokok alasan yaitu Kolonel Zulkifli Lubis merupakan wakil KSAD yang telah memiliki pengalaman, dan sudah sangat mengerti seluk beluk pekerjaan sebagai KSAD, mendapat dukungan presiden sebagai Panglima Tertinggi, tidak memiliki sangkut paut dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Tetapi karena pertimbangan senioritas, maka wakil presiden mengusulkan Kolonel Simbolon menggantikan KSAD Bambang Sugeng, tapi hal tersebut tidak disetujui oleh sidang Kabinet karena dianggap tersangkut peristiwa 17 Oktober 1952.<sup>61</sup>

Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh Kolonel Bambang Supeno dan kelompoknya yang bersebrangan dengan pimpinan Angkatan Darat untuk mencapai keinginannya dengan mempengaruhi Panglima-panglima daerah termasuk Bambang Sugeng. Pada tanggal 19 Oktober 1952 kolonel Bambang Supeno, Kolonel Suhud, dan Kolonel Sapari menghadap

---

<sup>60</sup> Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, *op.cit*, hlm 122-123

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 170-171.

kepada kolonel Bambang Sugeng di Surabaya untuk menjelaskan mengenai peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa panglima teritorium V\Brawijaya Letkol Dr. Suwondo ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pejabat KSAD Kolonel Bambang Sugeng mengawali tugasnya dengan menyelesaikan peristiwa 17 Oktober melalui prosedur hukum di pengadilan Tinggi Militer, dengan melakukan pemeriksaan terhadap mantan KSAD A.H Nasution dan para panglima teritorium serta beberapa perwira Angkatan darat yang dianggap bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Termasuk Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor TB Simatupang.

Walaupun pemeriksaan telah dilakukan sedemikian jauh dan meluas akan tetapi penyelesaiannya melalui proses ini tidak membuahkan hasil. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah keputusan pejabat KSAD kolonel Bambang Sugeng menetapkan Letkol Warrow sebagai pejabat panglima Teritorium VII\Maksar. Keputusan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari menteri pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, karena dianggap bertentangan dengan dasar-dasar usaha penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.

Hambatan lain yaitu pejabat KSAD kolonel Bambang Sugeng dalam membangun Angkatan Darat adanya peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1953, dimana Menteri yang baru Mr. Iwa kusumasumantri merubah susunan

kementrian pertahanan. Dampak kebijaksanaan itu antara lain dibekukannya GKS (Gabungan Kepala Staf) Angkatan perang yang di pimpin oleh Jenderal TB. Simatupang sebagai coordinator kepala-kepala Staf Angkatan Darat. Setelah gabungan kepala ini ditarik kabinet, berarti sewaktu-waktu masingmasing Kepala Staf Angkatan bertindak sebagai ketua Rapat. Penetapan peraturan tersebut menjadikan tidak jelas batas antara kebijakan. Politik militer dan militer teknis. Akibatnya timbul kegoncangan dalam Angkatan Darat. Munculnya perbedaan faham antara KSAD dengan menteri pertahanan mendorong KSAD kolonel Bambang Sugeng pada tanggal 2 Desember 1953 mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang disampaikan kepada presiden\Panglima tertinggi, perdana menteri Wilopo, Menteri Pertahanan dan kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor TB. Simatupang.<sup>62</sup>

Menteri pertahanan Iwa Kusuma Sumantri kemudian mengusulkan calon yang baru lagi kepada siding Kabinet, yaitu Kolonel Bambang Utoyo dengan beberapa pertimbangan yaitu Seniortitas, berpengalaman dalam memimpin divisi TNI, karena pernah sebagai pimpinan divisi Sumatera Selatan, tidak ada saangkut pautnya dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Akhirnya pemerintah mengangkat Bambang Utoyo seagai pengganti KSAD Bambang Sugeng, namun juga mendapatkan kendala dan tantangan hebat dari

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 133-134

para perwira Angkatan Darat dengan alasan bahwa Bambang Utoyo mempunyai cacad fisik karena sebagian tangan kanannya sudah dipotong. Pada saat upacara pelantikan di Istana Negara oleh Presiden, para perwira tinggi Angkatan Darat banyak yang tidak hadir, bahkan anggota korp musik angkatan darat yang seharusnya bertugas mengiringi upacara pelantikan juga memboikot tidak hadir,, sehingga diganti oleh korp music dari jawatan pemdam kebakaran Jakarta Raya. Jabatan Kolonel Bambang Utoyo tidak bertahan lama, hanya sekitar 3 bulan dan kemudian diganti oleh Kolonel AH Nasution yang tercatat sebagai Jabatan KSAD untuk yang kedua kalinya.<sup>63</sup>

### **3.2 Diangkat Menjadi Seorang Diplomat**

Bersangkutan dengan pengabdian yang telah Bambang Sugeng lakukan yang dijalani dengan penuh kesetiaan terhadap Indonesia, maka pemerintah meminta kesanggupan mewakili Negara Republik Indonesia sebagai seorang Duta Besar. Reputasi kepemimpinannya, kapasitasnya sebagai mediator dan dialog diplomatis yang dimilikinya mengantarkan dirinya sebagai prajurit TNI pertama yang dikaryakan (Dwi Fungsi) menjadi seorang Diplomat di beberapa negara.<sup>64</sup>

Pada awal Bambang Sugeng menjabat sebagai Duta Besar RI, pemerintah Indonesia dibawah perdana Menteri Ali Sastro Amidjoyo yang memiliki kebijakan luar negeri: (dalam Hartato, 2009: 142) “ *Kerja sama*

---

<sup>63</sup> Edi Hartoto, *loc.cit.*

<sup>64</sup> Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, *op.cit.*, hlm 142.

*dengan golongan Negara-negara Asia-Afrika yang ditunjukan untuk memperkuat usaha kearah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Politik Luar Negeri yang digariskan yaitu politik Luar Negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan yang menuju kearah perdamaian dunia, politik kearah kerjasama yang erat antara Negara-negara Asia-afrika dan politik bertetangga yang baik”.*<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Deparlu, 25<sup>th</sup> Deparlu 1945-1970, Panitia Sejarah Deparlu, Jakarta, 1970.